

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu pilar pendidikan adalah pendidikan dasar. Hal ini dikarenakan pendidikan dasar menjadi penentu pada pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, dalam UU Sisdiknas Pasal 11 pada ayat (2) disebutkan bahwa ‘Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2).’ Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2). Mengingat betapa pentingnya peranan pendidikan dasar dalam proses pendidikan, maka kualitas pendidikan dasar menjadi suatu keharusan dalam peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Pendidikan dasar merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga diperlukan adanya kewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu di mana pun yang bebas biaya atau *quality compulsory education*. Hal ini tertuang dalam kesepakatan Forum Pendidikan Dunia tahun 2000 yang berlangsung di Dakar, Senegal. Dalam forum ini, disepakati bahwa pada tahun 2015 masyarakat di seluruh dunia harus dapat mengenyam pendidikan dasar yang bermutu (Coulson, 2003: 1).

Majelis Umum PBB dalam deklarasinya memberikan penekanan yang tegas terhadap sasaran bahwa pendidikan dasar harus dinikmati seluruh masyarakat dunia pada tahun 2015. Hal ini dikemukakan melalui Deklarasi Milenium yang dinyatakan pada tanggal 8 September 2000 yang menyepakati bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan pada tahun 2015.

To ensure that, by the year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling and that girls and boys will have equal access at all levels of education.

Untuk memastikan bahwa pada tahun 2015, anak-anak di manapun, baik laki-laki maupun perempuan akan mampu menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh dan bahwa anak-anak perempuan dan laki-laki akan mempunyai akses yang sama pada setiap jenjang pendidikan (Willmore, 2004: 17).

Terselenggaranya pendidikan dasar yang bermutu sangat tergantung pada berbagai faktor yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai sistem, secara universal memiliki komponen "*input*", "*proses*", dan "*output*" (Slamet, 2003: 4). Dengan demikian, mutu pendidikan sangat tergantung pada faktor input dan proses yang ada dalam sistem persekolahan tersebut.

Salah satu aspek penting dalam sistem persekolahan adalah proses. Proses dipandang sebagai kinerja inti dari suatu sistem persekolahan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam proses ini, seluruh *input* diolah untuk menghasilkan suatu *output*.

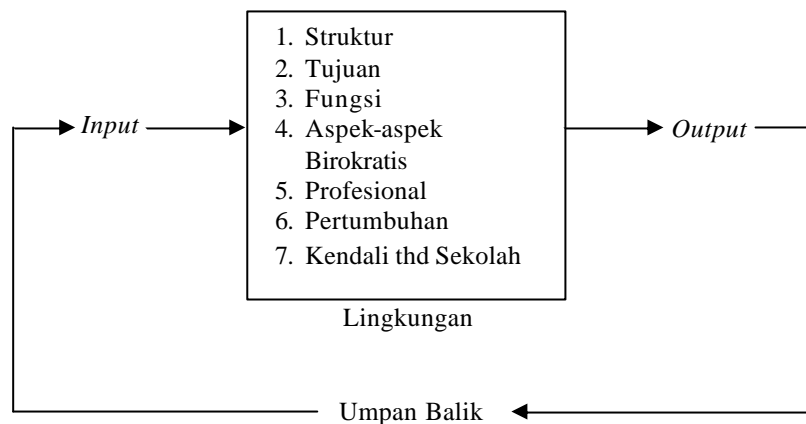
Berdasarkan hal tersebut di atas, sekolah dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks (Komariah dan Triatna, 2005:1). Hal ini disebabkan

karena selain terdiri atas *input-proses-output*, sekolah juga memiliki akuntabilitas terhadap konteks pendidikan dan *outcome*. Terkait dengan sistem persekolahan, Chubberley (dalam Hanson, 1996: 21) bahkan menggambarkan sekolah sebagai suatu pabrik yang memproses bahan baku untuk konsumsi sosial.

Our schools are, in a sense, factories in which the raw products (children) are to be shaped and fashioned into products to meet the various demands of life. The specifications for manufacturing come from the demands of twentieth-century civilization, and it is the business of the school to build its pupils according to the specifications laid down. This demands good tools, specialized machinery, continuous measurement of production to see if it is according to specifications, the elimination of waste in manufacture, and a large variety in the output.

Menurut Chubberley dikatakan bahwa dalam proses persekolahan, siswa dibentuk menjadi suatu produk untuk dapat memenuhi berbagai tuntutan kehidupan. Dalam prosesnya, agar dapat memenuhi spesifikasi yang menjadi tuntutan, maka diperlukan sarana yang baik dan selalu dilakukan pengukuran agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam memandang struktur sosial sekolah sebagai suatu organisasi, maka batasan-batasan sistem terbuka berkisar pada sekolah dan ruangan kelas. Sistem sekolah terbentuk dan berubah melalui interaksi antara sekolah dengan lingkungannya. Sekolah melayani tujuan bagi organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga lain yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, apabila membicarakan mengenai sekolah, maka hal yang dibahas sebenarnya adalah mengenai apa yang diharapkan dari sekolah oleh lingkungannya dan bagaimana harapan tersebut direfleksikan dalam tujuan-tujuan sekolah. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan ke dalam bagan skematis berikut ini.



Gambar I.1 Model Sistem Terbuka Organisasi Pendidikan
(Sumber: Ballantine, 2001: 132)

Permasalahan lingkungan pendidikan menjadi suatu faktor yang dapat menjadi daya dukung maupun ancaman sekaligus. Dikatakan menjadi suatu daya dukung apabila lingkungan sekolah tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Lingkungan dapat dikatakan sebagai ancaman apabila pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan suatu lingkungan tidak dapat dikelola dengan baik.

Siswa SMP, secara sosiologis merupakan individu dan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain sebagai partner dalam berinteraksi. Interaksi yang positif tidak secara serta merta dimiliki, melainkan individu perlu belajar membentuk perilaku sopan santun dalam pergaulan. Salah satu cara untuk mempersiapkan hal tersebut adalah melalui pendidikan di sekolah yang dimanifestasikan dalam perilaku yang sopan, dapat menghargai orang lain, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Melalui berbagai aktivitas belajar di sekolah, diharapkan siswa mendapatkan pengetahuan, nilai-nilai sosial budaya, sikap dan ketrampilan yang optimal agar dapat

mengenal lingkungan pendidikan yang lebih luas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan individu guna memasuki kehidupan dalam masyarakat serta mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berkembang.

Secara psikologis, siswa usia SMP berada pada tahap perkembangan periode operasi formal (*formal operations*) (Good dan Brophy, 2004: 64). Pada periode ini, anak akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara simbolik dan mampu memahami isi secara bermakna tanpa memerlukan adanya kehadiran objek secara fisik atau bahkan hanya berdasarkan pencitraan yang didasarkan pada pengalaman masa lalunya terhadap objek tersebut.

Kondisi kejiwaan pada anak usia ini menurut Cohen dan Ainley seperti dikutip oleh Brown, dkk., (2008: 29) dikatakan harus menghadapi krisis identitas yang disebabkan karena segala sesuatu yang dilakukannya akan dinilai oleh orang lain. Anak akan berusaha untuk mencari jati dirinya. Secara lengkap Cohen dan Ainley menjelaskan:

“Young people have had to carry a peculiar burden of representation: everything they do, say, think, or feel, is scrutinized by an army of professional commentators for signs of the times. Over the last century, the ‘condition of the youth question’ has assumed increasing importance as being symptomatic of the health of the nation or the future of the race, the welfare of the family, or the state of civilization as we know it.”

Kaitannya dengan penyesuaian diri siswa terhadap lingkungannya, diharapkan siswa menjadi sosok pribadi yang berilmu pengetahuan, beriman dan bertaqwa. Oleh karena itu, siswa SMP secara individu maupun kelompok diharapkan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengurangi iman dan taqwanya kepada Tuhan. Sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa (IMTAQ), siswa diharapkan mampu menempatkan diri sebagai sosok manusia

yang memiliki budi pekerti yang luhur, dalam ajaran agama Islam disebut akhlakul karimah atau akhlak mulia.

Berbicara tentang budi pekerti berarti yang dimaksud berbicara tentang kebaikan dan kejahatan, perilaku sopan dan tidak sopan dalam hubungannya dengan adat istiadat dan budaya lingkungan tempat tinggal. Selain itu, ajaran budi pekerti perlu diberikan pada siswa, agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulan, baik di rumah maupun di sekolah. Mangacu pada Kamus Umum Bahasa Indonesia (Yandianto, 1997: 56), budi pekerti luhur adalah alat yang merupakan panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu sifat dan sikap untuk membentuk perilaku yang baik sehingga akan dapat menerapkan sikap pergaulan dalam bentuk perilaku yang sopan.

Pembentukan perilaku menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi sekolah. Atas dasar hal tersebut maka di sekolah-sekolah saat ini disediakan tenaga khusus sebagai konselor.

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan dalam bentuk salah satu kualifikasi pendidik yang sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, dan tutor. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan konselor dalam sistem persekolahan disetarakan dengan profesi guru.

Kedudukan konselor yang merupakan salah satu pendidik Kondisi tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan MENPAN Nomor 84

Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya serta Surat Keputusan MENDIKBUD No. 025/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Kedua SK tersebut mengandung arahan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, oleh guru kelas di tingkat SD dan guru pembimbing di tingkat SMP dan SMA (Anonim, 2008: 17).

Dalam menjalankan tugasnya, guru Pembimbing sama seperti profesi guru lainnya diatur dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang undang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban yang melekat dalam profesi tersebut.

Keberadaan dan fungsi konselor di sekolah yang sudah maju seperti di SMP Negeri 7 Surakarta menjadi salah satu penunjang dalam keberhasilan pendidikan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran di sekolah akan mempunyai ketergantungan yang timbal balik antara proses belajar klasikal di kelas dengan bantuan bimbingan dan konseling. Selain itu, SMP Negeri 7 Surakarta yang sudah menjadi salah satu sekolah percontohan dalam pengelolaan bimbingan konseling di sekolah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik pengelolaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri

7 Surakarta dalam penanganan kedisiplinan siswa? Fokus tersebut selanjutnya dapat dijabarkan menjadi tiga sub fokus.

1. Bagaimana karakteristik perencanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Surakarta dalam penanganan kedisiplinan siswa?
2. Bagaimana karakteristik pelaksanaan dan pengendalian bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Surakarta dalam penanganan kedisiplinan siswa?
3. Bagaimana karakteristik evaluasi pengelolaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Surakarta dalam penanganan kedisiplinan siswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, selanjutnya dapat diketahui tujuan penelitian yang dilakukan. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Surakarta dalam penanganan kedisiplinan siswa. Tujuan khusus penelitian tersebut dirinci menjadi tiga.

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik perencanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Surakarta dalam penanganan kedisiplinan siswa.
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik pelaksanaan dan pengendalian bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Surakarta dalam penanganan kedisiplinan siswa.
3. Untuk mendeskripsikan karakteristik evaluasi pengelolaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Surakarta dalam penanganan kedisiplinan siswa serta solusi yang dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik yang bersifat praktis maupun yang bersifat teoritis. Manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan informasi bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta mengenai karakteristik upaya sekolah dalam peningkatan kedisiplinan siswa melalui program bimbingan dan konseling.
- b. Sebagai gambaran bagi instansi terkait, khususnya para guru Bimbingan dan Konseling mengenai karakteristik upaya sekolah dalam peningkatan perilaku disiplin siswa melalui program bimbingan dan konseling.
- c. Dengan mengetahui tentang karakteristik upaya sekolah dalam peningkatan perilaku disiplin siswa melalui program bimbingan dan konseling, diharapkan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan bimbingan dan konseling bagi siswa menjadi semakin meningkat.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

- a. Memberikan sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dan mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian mengenai manajemen bimbingan dan konseling di sekolah.

E. Daftar Istilah

1. Bimbingan dan Konseling

Istilah bimbingan dan konseling diartikan suatu proses pemberian bantuan kepada siswa, yang dilakukan secara terus menerus supaya siswa dapat memahami dirinya, sehingga sanggup mengarahkan diri untuk berperilaku secara wajar, sesuai tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi: (1) bimbingan pengajaran dan belajar, (2) bimbingan pendidikan, (3) bimbingan sosial, (4) bimbingan masalah pribadi, (5) bimbingan dalam menggunakan waktu senggang, dan (6) bimbingan pekerjaan

2. Kedisiplinan Siswa

Kedisiplinan adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh masyarakat dengan tujuan utama pemberian disiplin yaitu untuk menolong individu mengembangkan *self direction* dan *self control* agar segala perilaku yang diperbuat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.